

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. DKPP bukanlah merupakan badan peradilan etik. Karena DKPP bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. DKPP adalah organ tata usaha negara (TUN) yang didesain sebagai peradilan etik oleh para pembentuknya (termasuk Prof. Jimly Asshidiqie) dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku didalam peradilan modern. DKPP terbatas hanya sebagai lembaga etik meskipun tugas dan kewenangannya, serta prosedur persidangan dan putusannya mencerminkan DKPP adalah suatu peradilan.
2. Penggunaan Asas *ultra petita* oleh DKPP dalam Putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-IV/2015 adalah dikarenakan hilangnya sinergisitas sebagai penyelenggara pemilu, dengan integritas serta profesionalismenya dari Bawaslu Provinsi Gorontalo yang tidak hanya disebabkan oleh Teradau (Hasyim Wantu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo) dan a. n. Pihak terkait (Darwin Botutihe selaku Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo) akan tetapi disebabkan juga oleh Burhanudin Alpiah selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang ketika tugas dan kewenangnya tidak berjalan semestinya maka penyelenggaraan pemilu yang jujur dan luber tidak akan berjalan dengan baik.

3. Penggunaan Asas *ultra petita* oleh DKPP dalam memutus kasus manapun (yang menjadi kewenangan DKPP) merupakan tindakan yang sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Karena sebagaimana amanat UU No. 15 tahun 2011 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2015, menyatakan bahwa DKPP bukanlah badan peradilan etik. Sementara, asas *ultra petita* merupakan prinsip yang dipakai dalam hukum acara (publik) yang notabene merupakan hukum formil yang dipakai dalam lingkungan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945.

## **5.2. Saran**

Dengan ditetapkannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa DKPP bukanlah badan peradilan, maka seyogyanya penggunaan asas-asas yang notabene hanya dipakai di dalam lingkungan lembaga peradilan yang diakui di Indonesia, tidak serta merta diterapkan oleh DKPP dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (perspektif baru tentang 'rule of law and rule of ethics' & constitutional law and constitutional ethics)*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- Chakim, M. Lutfi, 2014. *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*. Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2 Edisi Juni
- Chandranegara, Ibnu Sina, 2012. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1 Edisi Maret
- Fadel, 2012. *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia*. Skripsi di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media Grup
- \_\_\_\_\_, 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, 2013. *Menilik Kesiapan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu 2014*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Edisi Oktober
- Nazriyah, R. 2011. *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*. Jurnal Hukum, Vol. 18 No. Edisi Khusus Oktober
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:
- Priangani, Ade, 2013. *Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Masa Transisi Demokrasi: Pemilu 2004 Dan 2009*. Jurnal Online Whestpalia, Vol. 12 No.1 Edisi Januari-Juni
- Purnamasari, Dwi dkk, 2015. *Peran Panwaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014*. JKMP, Vol. 3 No. 1 Edisi Maret

- Rajab, Achmadudin, 2013. *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Pemilukada*. Tesis Megister di Universitas Indonesia, Jakarta
- Ramadhani, Farid Maulana, 2015. Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5 No. 1 Edisi April
- Sekartadi, Lalu Kukuh, 2015. *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO.74/DKPP-PKE-II/2013)*. *Jurnal IUS*, Vol. III No. 8 Edisi Agustus
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normati Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti, Ramlan dkk, 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI
- Wantu, Fence M. dkk, 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia
- Wantu, Fence. M, 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia
- \_\_\_\_\_, 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Reviva Cendekia
- Zoelva, Hamdan, 2013. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3 Edisi September

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah

### **Internet**

Rafli Fadilah Achmad, "Suatu Perdebatan Klasik : Ultra Petita Dalam Jagat Keadilan dan Kepastian Hukum", Mahkamah Mahasiswa UI, diakses pada <http://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id/suatu-perdebatan-klasik-ultra-petita-dalam-jagat-keadilan-dan-kepastian-hukum/>, pada tanggal 9 Juni 2016

## CURICULLUM VITAE



Nama : Janwar Hippy

Nama Panggilan : Joni/Janu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 21 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 01 Januari 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum

No. HP : 085242081162

e-mail/PIN BBM : hippyjanwar@gmail.com/5810a3a6

Alamat : Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten  
Pohuwato Provinsi Gorontalo

### **Jenjang Pendidikan**

- a. SD I Inpres Manawa Tahun 2000
- b. SMP Negeri 2 Marisa Tahun 2009
- c. SMA Negeri 1 Buntuliya Tahun 2012

### **Pengalaman Organisasi**

- a. Anggota Bidang Kerohanian HJM Ilmu Hukum Tahun 2012
- b. Koordinator Lapangan Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2013
- c. Sekretaris Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron UNG Tahun 2014
- d. Ketua Ikatan Putra-Putri Kampus UNG 2014
- e. Ketua Departemen Pengembangan Daerah Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato Tahun 2014
- f. Ikatan Bidang Minat dan Bakat SENMA FIS Tahun 2013-2014
- g. Koordinator Wilayah Indonesia Timur Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia Tahun 2015
- h. Sekretaris Jenderal Lembaga Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Periode 2015
- i. Ketua Umum Senat Mahasiswa Pertama Fakultas Hukum Tahun 2015-2016

## **Pengalaman Akademik**

- a. Juara I Debat Ilmiah Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2014
- b. Juara II Putra Kampus UNG Tahun 2014
- c. Peringkat IV Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Se-Indonesia di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung Tahun 2013
- d. Peringkat VI Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Se-Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2014
- e. Pembicara Terbaik Debat Ilmiah Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2014
- f. Peserta Pertemuan BEM Se-Indonesia di Universitas Udayana Bali, Tahun 2014
- g. Peserta Dialog Mata Najwa Metro TV, Tahun 2014
- h. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2014
- i. Peringkat I Lomba Makan Tercepat se-Provinsi Gorontalo Tahun 2014
- j. Peserta Musyawarah I Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- k. Delegasi UNG dalam Dialog Indonesia Lawyers Club (ILC) TV ONE Tahun 2015
- l. Peserta Musyawarah II Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun 2016 Di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta